

Nama : Filipus Rinaldo Nggoe Djie

NPM : 21.75.7053

Filsafat Demokrasi

PERANAN AGAMA DALAM SEBUAH NEGARA SETURUT PANDANGAN HABERMAS

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ialah sebuah gambaran bagaimana agama menjadi motor kehidupan warga negara. Berorientasi tentang negara yang dikenal akan keanekaragaman agama, sebut saja Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, maupun Konghucu. Hal ini memperlihatkan bahwa agama memiliki pengaruh kuat bagi warga Indonesia. Menurut Iffa Sabrina (*Peran Agama dalam Kehidupan Berpolitik*: yoursay.suara.com - 2021), dalam opininya di sebuah halaman website mengatakan bahwa kehadiran agama dalam negara semakin diperkuat dengan hadirnya partai – partai politik serta organisasi – organisasi massa yang mengatasnamakan agama. Meski demikian, agama semestinya berada di luar lingkup dunia perpolitikan Indonesia karena akan memberi dampak yang berbeda bagi warga sekuler, sebagaimana yang dikemukakan oleh Otto Gusti Madung dalam materi kuliah Filsafat Demokrasi tentang *Agama dan Demokrasi*. Akan tetapi, fenomena yang terjadi di dunia politik Indonesia justru berlawanan akan hal itu, dimana pemerintah menggunakan kekuatan agama untuk mengambil alih kehidupan masyarakat negara.

Tidak sedikit, lanjut Sabrina, pemerintahan di setiap negara yang menggunakan agama untuk memberikan sebuah penerimaan kekuasaan atau legitimasi pada kekuasaan politik. Pernyataan ini semakin masuk akal dimana pada negara Indonesia sendiri, mereka menegaskan bahwa agama menjadi dasar negara pada Undang – Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa ‘negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.’ Maka dari itu kita bisa memberi kesimpulan bahwa kehidupan sebuah negara akan senantiasa dikaitkan dengan agama. Meski sekilas kita melihat hal demikian sebagai sesuatu yang baik, namun ada sebuah ‘pemainan’ kepentingan antara negara dan agama itu sendiri.

Bagi Muhamad Abrar Ghifari (*Relasi antara Agama dan Politik* : politik.fisip.unair.ac.id - 2022) , dalam opininya mengatakan bahwa agama dan negara berada dalam proses tarik menarik kepentingan dimana agama memiliki peran strategis dalam mengkonstruksi dan memberikan kerangka dan norma untuk kedisiplinan masyarakat, sedangkan negara atau pemerintahan ‘memakai’ agama sebagai legitimasi dogmatik untuk mengikat warga negara

sehingga menjalankan aturan – aturan yang telah dibuat. Hubungan dua entitas ini, lanjutnya, justru akan berpeluang menciptakan negara yang teokrasi, negara yang bernakhodakan agama sebagai pusat, yang berujung pada hadirnya para pemuka agama yang bertindak berlawanan dengan apa yang telah dibicarakan, baik secara moral maupun etika, yang kita kenal dengan hipokripsi.

Persoalan relasi agama dan negara , bagi Ghifari, merupakan persoalan lama dalam sejarah manusia modern yang selalu menimbulkan kontroversi tentang tempat agama dalam politik, setidaknya dalam kaitannya dengan dua kelompok yang bertolak belakang tersebut. Seorang pelobi agama berpartisipasi dalam semua pertimbangan politik. Gagasan ini disebut teokrasi, pemerintahan yang berdasarkan agama. Sehingga agama menjadi payung tertinggi dari segala hal politik. Di sisi lain, ada yang benar-benar menolak campur tangan agama dalam urusan politik. Agama harus dikesampingkan dari perbincangan publik dan dipahami sebagai urusan privat yang hanya menyangkut kepentingan individu. Agama tidak lebih dari ritual yang menggambarkan ketergantungan manusia pada dewa-dewa mereka.

Dalam karya Jurgen Habermas yang berjudul Teori Tindakan Komunikatif, sebagaimana ditulis oleh Novva Gora (*Menimbang Peran Agama Dalam Ruang Publik Menurut Habermas*: sfcogito.org – 2018), dalam tulisannya, menjelaskan bahwa agama, menurut pandangan Teologi Abad Pertengahan, yang adalah sumber kebenaran dengan dogma sebafei acuan, perlahan – lahan tergantikan oleh rasionalisasi atau segala sesuatu dipikiran dengan pikiran logis atau akal budi, dimana merupakan hasil dari modernisasi. Hal inilah, menurut Habermas, menciptakan rongga pada relasi agama dan negara pada saat itu. Relasi agama dan negara jika dilihat secara seksama memang tidak berada pada situasi yang baik karena masih ada distansi atau jarak antara yang profan dan sakral. Namun demikian, yang profan tidak memiliki otonomi di hadapan yang sakral atau suci. Secara teliti, masyarakat tradisional memandang kegiatan non-ritual juga dari termasuk dalam bagan dogmatis agama.

Senyatanya, hubungan atau relasi antara agama dan negara secara tidak langsung merupakan salah satu gambaran relasi antara agama dan ruang publik, sebagaimana yang dijelaskan dalam kuliah Filsafat Demokrasi, dimana terdapat tiga pandangan akan relasi agama dan ruang publik, *pertama* ialah pandangan bahwa agama tidak boleh terlibat dalam diskusi-diskusi politik di ruang publik atau dengan kata lain agama digeserkan atau diletakkan dalam ruang privat. *Kedua* ialah pandangan bahwa agama boleh melibatkan diri pada diskusi politik dalam ruanh publik tanpa adanya batasan. Pernyataan ini diakui oleh seorang filsuf agama

Nicholas Wolterstorff, dimana perlu untuk membangun diskusi politik yang dapat mengenai warga sekuler yang membantunya untuk menjalankan kewajiban hukum tanpa adanya pembatasan terhadap keyakinan religius yang dianut seseorang. Dan yang *ketiga* ialah pandangan bahwa agama dapat terlibat dalam setiap diskusi politik jikalau agama dapat memberi batasan pada setiap pernyataan atau argumentasi yang tentunya hanya mampu dimengerti dengan akal budi.

Seturur dengan hubungan itu, Jurgen Habermas, sebagaimana yang terdapat dalam materi kuliah Filsafat Demokrasi yang diberikan oleh Otto Gusti Madung, memiliki pandangan tersendiri terhadap peran agama dalam ruang publik, secara khusus dalam ranah politik. Pandangan Habermas ini diawali dengan penegasan dimana dalam memahami argumentasi – argumentasi sekuler yang muncul dalam perdebatan politik, diperlukan kemampuan epistemis sehingga mampu melihat diluar pemahaman individu keyakinan religius menurut pandangan orang luar dan mengkaitkannya dengan pandangan sekuler sendiri. Kemudian pandangan Habermas ini dilanjutkan dengan kritik mengenai kecenderungan untuk menyingkirkan agama ke ruang privat. Bagi Habermas sendiri, tuntutan kepada warga religius untuk menggunakan argumentasi sekuler, diluar ranah agama, dalam setiap perdebatan politik ialah tuntutan yang berlebihan. Sebaliknya, Habermas setuju dengan Wolterstorff dimana makna integral dari keyakinan religius mengakibatkan sulitnya warga religius dalam menhayati kepribadian yang terpecah belah ke dalam peran yang berbeda satu sama lain.

Habermas, sebagaimana yang dipahami oleh Novva Gora, melihat bahwa agama memiliki potensi untuk menjadi partner untuk mengkritisi dan mengembalikan arah perkembangan masyarakat modern yang dianggap berada pada jalur yang salah. Perubahan pendapatnya tentang keberadaan dan peran agama bukanlah perubahan dari seorang agnostik menjadi seorang beriman yang taat. Agama tidak bisa begitu saja dikurung dalam ruang privat, seperti peristiwa sekularisasi seperti domestikasi agama. Di sisi lain, Habermas tetap berpegang teguh pada tradisi liberal yang meyakini “akal sehat” sebagai dasar pemisahan gereja dan negara serta basis kekuasaan negara modern yang tidak lagi bergantung pada legitimasi agama.

Bagi Habermas, lanjut Gora, perlu mempertimbangkan gerakan keagamaan damai dengan struktur opini mereka. Intervensi agama di ruang publik ini juga membutuhkan bagian dari masyarakat sekuler yang mau belajar satu sama lain. Warga negara sekuler, dengan pandangan internasional buta tentang agama mereka, perlu berkomunikasi dengan orang

beriman. Misalnya, dalam kasus sosial yang disebabkan oleh bioetika, agama dapat mengungkapkan pandangannya sebagai sumber moralitas yang penting. Melalui pentingnya agama berfungsi memberikan landasan moral bagi diskursus publik dan oleh karena itu, agama memang dapat memainkan peran penting dalam ruang publik.

Maka dari itu, selaku penulis essay ini hendak menyimpulkan bahwa agama sendiri memiliki tempat dalam ruang publik, dalam diskusi-diskusi politik dan agama sendiri nyatanya mampu memberi dampak baik terhadap kehidupan masyarakat yang hidup di tengah rasionalisasi akibat modernisasi. Hal serupa dinyatakan oleh Jurgen Habermas dimana agama mampu sebagai partner bagi masyarakat sekuler yang bertugas untuk mengkritik dan mengembalikan pandangan masyarakat yang sampai saat ini masih berat sebelah oleh karena pemikiran sekuler. Agama sendiri diyakini mampu mengimbangi pemahaman – pemahaman yang berorientasi pada akal budi melalui pemahaman warga religius terhadap segala sesuatu. Dengan demikian agama dapat berjalan bersama negara untuk membantu masyarakat agar tidak terpaku pada modernisasi yang semakin lama semakin mengikis kepribadian masyarakat sendiri.